

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas adalah kewajiban dari pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Lebih lanjut, Bovens (2007) mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu mekanisme di mana aktor publik bertanggung jawab atas tindakannya kepada pihak luar yang berhak meminta pertanggungjawaban.

Berdasarkan pemahaman ini, akuntabilitas dalam pemerintahan daerah tidak hanya didefinisikan sebagai kewajiban administratif untuk melaporkan, tetapi juga didefinisikan sebagai tingkat transparansi, keterbukaan, dan tanggung jawab pemerintah untuk mengelola sumber daya publik. Sangat penting untuk menilai kinerja pemerintah daerah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menyajikan informasi keuangan secara akurat, relevan, dan dapat dipercaya sehingga

masyarakat dan pihak berkepentingan yang mengawasi dan membuat keputusan dapat menggunakannya. Oleh karena itu, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan meningkat sebagai hasil dari akuntabilitas yang baik.

2.1.2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan seluruh tahapan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007). Tanggung jawab ini tidak hanya ditujukan kepada pemerintah pusat, melainkan kepada masyarakat dan DPRD sebagai wujud transparansi serta pengawas publik atas pemakaian anggaran daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 mengenai pengelolaan keuangan daerah, keuangan daerah mencakup seluruh hak dan tanggung jawab daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah daerah yang dapat diukur menggunakan uang, serta segala jenis aset yang memungkinkan untuk menjadi milik daerah terkait dengan hak dan tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, setiap elemen keuangan daerah harus dikelola secara teratur, transparan, dan akuntabel agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

2.1.3. Dimensi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Mardiasmo (2009) membagi dimensi dari akuntabilitas menjadi 4 yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Akuntabilitas Kejujuran berhubungan dengan menghindari penyalahgunaan jabatan, sementara akuntabilitas hukum menekankan jaminan kepatutan terhadap hukum dan peraturan penting lain yang terkait dengan pemanfaatan dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses berhubungan dengan penilaian apakah prosedur yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas sudah memadai, mencakup kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berhubungan dengan penilaian apakah target yang telah ditetapkan dapat tercapai serta apakah telah dipertimbangkan alternatif program yang menghasilkan hasil yang optimal dengan biaya paling rendah.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berarti pemerintah, baik pusat maupun daerah harus bertanggung jawab atas kebijakan yang di ambilnya kepada DPR, DPRD, dan masyarakat umum.

2.2. Kualitas Laporan Keuangan

2.2.1. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan daerah merupakan ukuran seberapa baik informasi keuangan pemerintah disusun dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan publik. Laporan keuangan tidak hanya berperan sebagai sarana pelaporan, tetapi juga sebagai cerminan transparansi yang menggambarkan kondisi serta kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan adalah laporan terstruktur yang berisi tentang keuangan atau transaksi yang terjadi dan dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Dengan demikian, kualitas laporan keuangan ditentukan oleh seberapa baik laporan tersebut disusun sesuai standar dan prinsip akuntansi yang berlaku, serta kemampuan dalam menyajikan informasi secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang berkualitas baik akan mengurangi potensi kesalahan informasi serta meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap data yang disajikan. Dengan demikian, semakin tinggi kualitas laporan keuangan akan berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah

2.2.1. Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 indikator dari kualitas laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan dinyatakan relevan bila informasi yang terkandung di dalamnya mampu memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka menilai peristiwa masa lalu atau kini, memperkirakan masa depan, serta mengonfirmasi atau memperbaiki penilaian sebelumnya. Oleh karena itu, relevansi informasi laporan keuangan dapat ditentukan berdasarkan tujuan penggunaannya.

2. Andal

Laporan keuangan menyajikan informasi yang bebas dari penyimpangan makna dan kesalahan signifikan, menampilkan fakta secara jujur dan dapat dipastikan kebenarannya. Meskipun informasinya relevan, bila esensinya atau cara penyajiannya tidak dapat dipercaya, maka para pengguna data berpotensi mendapatkan informasi yang menyesatkan.

3. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan akan lebih bermanfaat bila informasinya dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan entitas pelapor lainnya secara umum.

4. Dapat dipahami

Laporan keuangan menyajikan informasi yang dapat dipahami oleh pengguna, dengan menggunakan bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka.

2.3. Aksesibilitas Laporan Keuangan

2.3.1. Pengertian Aksesibilitas Laporan Keuangan

Mulyana (2006) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berarti kemudahan seseorang memperoleh data keuangan. Kemudahan tersebut meliputi tersedianya akses yang luas, penyajian informasi yang jelas, serta pemanfaatan media yang memungkinkan laporan keuangan dapat dijangkau oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat umum. Dengan aksesibilitas yang baik, data keuangan tidak hanya dapat diakses oleh pihak internal pemerintah, tetapi juga oleh pihak eksternal sebagai wujud transparansi dan keterbukaan informasi publik.

Tingkat aksesibilitas laporan keuangan yang tinggi memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui dan memahami kondisi keuangan daerah secara lebih objektif. Hal ini mendorong peningkatan partisipasi serta pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat meminimalkan potensi penyimpangan. Oleh karena itu, aksesibilitas laporan keuangan menjadi faktor penting dalam mendukung terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.3.2. Indikator Aksesibilitas Laporan Keuangan

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur aksesibilitas laporan keuangan (Fauziah & Handayani 2017):

1. Keterbukaan

Pemerintah daerah wajib mempublikasikan laporan keuangannya secara terbuka kepada para pengguna laporan keuangan.

2. Kemudahan

Pemerintah perlu mempermudah para pengguna laporan keuangan untuk mengakses informasi tentang laporan keuangan pemerintah.

3. *Accesible*

Masyarakat dapat memperoleh laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.

2.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.4.1. Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Spencer & Spencer (1993) mendefinisikan kompetensi sebagai sifat dasar yang memengaruhi efektivitas kerja individu dalam melaksanakan tugasnya. Pada pengelolaan keuangan daerah, kompetensi SDM menjadi elemen penting karena berhubungan langsung dengan kemampuan aparatur dalam menjalankan fungsi keuangan sesuai regulasi yang berlaku. Kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang dimiliki aparat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Aparatur yang kompeten akan dapat menyusun, mengelola, dan menyajikan laporan keuangan dengan tepat,

akurat, serta tepat waktu, sehingga meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Sebaliknya, kurangnya kompetensi SDM dapat menimbulkan kesalahan dalam pencatatan, pengolahan, atau pelaporan keuangan, yang pada akhirnya menurunkan mutu informasi keuangan. Karena itu, kompetensi sumber daya manusia berperan penting dalam memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mendukung terciptanya akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.4.2. Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Spencer & Spencer (1993) terdapat 5 indikator kompetensi sumber daya manusia yaitu:

1. *Motives*

Sesuatu yang membuat seseorang terus menerus berpikir hingga melakukan tindakan.

2. *Traits*

Sifat yang memengaruhi perilaku atau respons seseorang terhadap sesuatu dengan cara tertentu, seperti rasa percaya diri, pengendalian diri, atau ketahanan (*hardiness*).

3. *Self Concept*

Sikap serta nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai tersebut diukur melalui tes kepada responden guna mengetahui nilai apa yang dimiliki orang itu, serta apa yang memotivasi mereka melakukan sesuatu.

4. *Knowledge*

Informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Pengetahuan (*knowledge*) adalah kompetensi yang bersifat kompleks.

5. *Skills*

Kemampuan menjalankan tugas tertentu, baik secara fisik maupun mental.

2.5. Kerangka Konseptual

2.5.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam penelitian ini, teori keagenan dijadikan landasan untuk menjelaskan hubungan antara pemberi mandat dan penerima mandat dalam dalam pengelolaan keuangan. Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan kontrak di mana pihak *principal* memberikan wewenang kepada pihak agent untuk melaksanakan tugas tertentu, termasuk pengambilan keputusan. Hubungan tersebut seringkali menimbulkan potensi perbedaan kepentingan antara principal dan agent, yang dapat menimbulkan konflik bila tidak dikelola secara efektif. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme kontrol dan pelaporan yang dapat memastikan bahwa *agent* beroperasi selaras dengan kepentingan *principal*.

Dalam konteks pemerintahan daerah, masyarakat berfungsi sebagai *principal* yang memberikan mandat kepada pemerintah daerah sebagai *agent* untuk mengelola sumber daya dan keuangan publik. Pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan melalui laporan keuangan yang berkualitas, transparan dan sesuai standar. Kemudahan

akses (aksesibilitas) laporan keuangan memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara terbuka, sehingga dapat melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah juga berperan penting dalam menjamin bahwa pengelolaan dan pelaporan keuangan dilakukan secara tepat dan akurat. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan, tingkat aksesibilitas laporan, serta kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

2.6. Hubungan Antar Variabel

2.6.1. Hubungan Kualitas Laporan Keuangan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, kualitas laporan keuangan menjadi elemen krusial yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan adalah laporan terstruktur yang berisi tentang keuangan atau transaksi yang terjadi dan dilakukan oleh suatu entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan yang berkualitas harus disusun secara tepat, akurat, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan berhubungan erat dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, karena laporan tersebut merupakan sarana utama bagi pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan yang berkualitas baik,

lengkap, jelas, dan sesuai standar akan menghasilkan informasi yang dapat dipercaya serta mempermudah masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong pemerintah menjadi lebih transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi kualitas laporan keuangan daerah, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangannya.

2.6.2. Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akses ke informasi keuangan daerah menjadi salah satu wujud transparansi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Menurut Mulyana (2006), aksesibilitas laporan keuangan berarti kemudahan yang diberikan kepada pengguna untuk mendapatkan data keuangan. Berdasarkan pandangan tersebut, aksesibilitas laporan keuangan terkait erat dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, karena kemudahan akses memungkinkan masyarakat untuk melihat dan memahami kondisi keuangan daerah secara lebih terbuka. Laporan keuangan yang mudah di akses memberi kesempatan kepada publik untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini akan memperkuat transparansi serta meningkatkan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan publik. Oleh karena itu, Semakin tinggi tingkat aksesibilitas laporan keuangan, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pun akan semakin tinggi,

2.6.3. Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, kemampuan aparatur pemerintah menjadi faktor penentu mutu hasil yang diperoleh. Kompetensi sumber daya manusia sangat penting agar setiap tahapan pengelolaan keuangan dapat berjalan efektif dan mematuhi peraturan yang ada. Menurut Spencer & Spencer (1993) kompetensi adalah sifat dasar yang memengaruhi efektivitas kinerja individu dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan pendapat tersebut, kompetensi sumber daya manusia berhubungan erat dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, karena kemampuan aparatur memengaruhi kualitas pengelolaan serta penyajian laporan keuangan. Aparatur yang berkompeten tinggi dapat melaksanakan tugas dengan tepat, akurat, dan sesuai regulasi, sehingga menghasilkan data keuangan yang dapat dipercaya. Sebaliknya, kompetensi yang rendah dapat menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan yang berakibat pada penurunan akuntabilitas. Oleh karena itu, semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia, maka semakin meningkat pula akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian menurut Defana & Rahayu (2023), dengan judul Pengaruh

Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021). Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi kasus pada badan keuangan dan aset daerah kabupaten bandung barat tahun 2021).

Penelitian Eviana dan Kristianto (2026), dengan judul Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi (Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.

Penelitian Purba dkk (2021), dengan judul Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan pada Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian Herlina dkk (2021), dengan judul Pengaruh Transparansi, Kompetensi, dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. Dari penelitian yang dilakukan memperoleh hasil transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muttaqien dkk (2024), dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. Dari penelitian yang dilakukan memperoleh hasil kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating.

Penelitian dahulu yang terakhir dilakukan oleh Somad dkk (2023), dengan judul Pengaruh Penyajian, Aksesibilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe. Penelitian tersebut memperoleh hasil penyajian dan transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan tetapi aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Defana & Rahayu (2023)	Independen: Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Pegawai BKAD Kabupaten Bandung Barat	Kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
2.	Eviana & Kristianto	Independen: Kualitas	Organisasi Perangkat Daerah	Kualitas laporan keuangan dan

	(2026)	Laporan Keuangan, Sistem Pelaporan Dependen: Akuntabilitas Kinerja Keuangan Mediasi: Komitmen Organisasi	Kabupaten Boyolali	sistem pelaporan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja keuangan
3.	Purba dkk (2021)	Independen: Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Aksesibilitas Laporan Keuangan	Pemerintah Kota Pemantangsiantar	Penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas

		Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah		pengelolaan keuangan daerah
4.	Herlina dkk (2021)	Independen: Transparansi, Kompetensi, Sistem Akuntansi Keuangan Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Mediasi: Sistem Pengendalian Internal	Pemerintah Kabupaten Indiragiri Hulu	Transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

		Pemerintah		
5.	Muttaqien dkk (2024)	Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Mediasi: Komitmen Organisasi	Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	Kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
6.	Somad dkk (2023)	Independen: Penyajian, Aksesibilitas, Transparansi Laporan	Pemerintah Kota Lhokseumawe	Penyajian dan transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap

		Keuangan		akuntabilitas pengelolaan keuangan tetapi aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
		Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD		

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kualitas laporan keuangan daerah merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam memberikan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan adalah laporan terstruktur yang berisi tentang keuangan atau transaksi yang terjadi dan dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan yang berkualitas baik dapat mendorong terciptanya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pihak terkait untuk melakukan penilaian. Berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, laporan keuangan yang berkualitas

mempermudah proses evaluasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Defana dan Rahayu (2023) serta Eviana dan Kristianto (2026) yang membuktikan bahwa kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan yang berkualitas baik, lengkap, jelas, dan sesuai standar akan menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Hal itu mendorong transparansi serta memperkuat tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Ha1: Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.8.2. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kemudahan memperoleh laporan keuangan daerah bagi pengguna disebut sebagai aksesibilitas laporan keuangan. Menurut Mulyana (2006), aksesibilitas ini mengukur sejauh mana pihak yang membutuhkan, termasuk masyarakat sebagai pengguna informasi publik, dapat mengakses data keuangan. Dalam rangka mengelola keuangan daerah, aksesibilitas menjadi elemen penting untuk menciptakan keterbukaan informasi kepada publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Defana & Rahayu (2023) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sementara penelitian yang dilakukan oleh Somad dkk (2023) menunjukkan hasil aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tingkat keterbukaan laporan keuangan menentukan sejauh mana masyarakat dapat mengakses data dan melakukan kontrol atas pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang mudah dijangkau meningkatkan transparansi dan mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dalam melaporkan kinerja keuangannya. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Ha2: Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

2.8.3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Spencer & Spencer (1993) kompetensi adalah sifat dasar yang memengaruhi efektivitas kinerja individu dalam melaksanakan tugasnya. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, kompetensi aparatur merupakan faktor kunci yang menentukan mutu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herlina dkk (2021)

menyatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Temuan serupa terdapat dalam penelitian Muttaqien dkk (2024) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan daerah. Kecakapan aparatur dalam mengatur keuangan daerah menjadi faktor utama yang kualitas pelaksanaan dan pengelolaan keuangan. Aparatur yang kompeten dapat melaksanakan proses pengelolaan keuangan secara tepat, akurat dan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Ha3: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah